

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak awal tahun 2020 melalui *World Health Organization* (WHO) dunia dinyatakan telah dianggap sebagai status pandemi global yang disebabkan oleh *virus corona* 2019 yang disebut juga sebagai pandemi *Covid-19*. Penyakit ini disebut sebagai status pandemi karena telah mewabah hingga menjangkit keseluruhan penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama kalinya pada tanggal 2 Maret 2020 yang secara langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo kepada publik (Putri, 2020). Seiring berjalannya waktu dengan adanya pandemi *Covid-19* banyak sekali terjadi perubahan-perubahan dalam aspek apapun dan tidak hanya pada masalah kesehatan. Dampak dari adanya pandemi ini juga merubah situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut secara langsung terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang harus ditunda karena merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*. Walaupun pada akhirnya tetap dilaksanakan di akhir tahun pada tanggal 9 Desember 2020 yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020. Pilkada tersebut dilaksanakan dengan perubahan teknis yang harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi *Covid-19*.

Pandemi yang terjadi sangat cepat ini juga merubah kondisi politik di Indonesia dengan membawa arus baru bagi perpolitikan Indonesia. Tidak hanya terjadi pada pelaksanaan Pilkada saja lebih jauh dari itu peta hubungan antara partai politik pendukung pemerintah dengan partai politik oposisi juga berubah. Dengan adanya pandemi bagi beberapa partai politik menjadi kondisi dimana dapat mengevaluasi ulang arah dan kebijakan politik khususnya memasuki era *new normal*. Menurut Prakoso Aji (2020) terdapat beberapa alasan berubahnya konstelasi politik di masa pandemi, yaitu ekosistem politik yang berubah karena pandemi dapat ditandai dengan menonjolnya peran pemerintah sebagai penanganan utama dalam kasus *Covid-19*. Pada setiap krisis yang ada, atas nama memulihkan

kondisi krisis pemerintah dalam melakukan segala sesuatu yang dianggap penting. Selain itu juga pemerintah memiliki hak untuk menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk dipakai dalam kepentingan bersama agar dapat mengeluarkan kondisi negara dari kondisi kritis. Oleh karena itu, dengan lingkungan politik yang seperti ini akan sangat terasa sekali bagaimana penguatan peran dan kedudukan pemerintah menjadi salah satu yang tidak dapat dipungkiri. Tidak hanya itu, alasan lainnya juga adanya rasa *sense of crisis* atau adanya kesamaan nasib. Segenap lapisan bangsa dituntut harus bersama-sama untuk melawan pandemi ini dan atas perasaan ini perbedaan-perbedaan politik harus disampingkan terlebih dahulu. Bahkan beberapa petinggi partai politik yang berada pada posisi di luar pemerintah juga seringkali menyatakan sikap persatuan dan mengajak masyarakat untuk bersatu dalam hal penanganan *Covid-19*. Dengan begitu, adanya pandemi justru menjadikan hubungan antar partai politik semakin cair dan lebih mudah untuk terciptanya konsensus-konsensus politik di masa pandemi *Covid-19*.

Namun, berubahnya kondisi partai politik ditataran nasional karena pandemi ini tidak dibarengi dengan sikap dan perilaku elite-elite partai politik itu sendiri. Mereka justru dinilai berseberangan dengan visi yang seharusnya saling bersama-sama menyelesaikan pandemi. Buruknya sikap dan perilaku elite partai politik ini pada akhirnya menimbulkan sikap kekecewaan masyarakat kepada partai politik. Pemicu atas kekecewaan masyarakat kepada partai politik adalah karena maraknya kasus-kasus korupsi yang menjerat elite partai politik dimasa pandemi *Covid-19*. Kasus-kasus korupsi tersebut terutama yang terjadi mulai awal pandemi tahun 2020 hingga akhir tahun 2021.

Menurut laporan CNN Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang berjudul “Korupsi Tak Berhenti di Masa Pandemi” terdapat beberapa kasus korupsi yang menjerat elite partai politik, yaitu:

1. Kasus korupsi Bupati Kutai Timur Ismunandar. Kasus ini ditindak KPK pada tanggal 2 Juli 2020. Tersangka dari kasus ini melibatkan 14 orang pejabat lainnya dan juga termasuk istri dari Ismunandar yaitu Encek Ur Firgasih. Pada saat itu Ismunandar juga menjabat sebagai Ketua Dewan

Pertimbangan DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kutai Timur. Sedangkan istrinya merupakan Ketua DPRD Kutai Timur yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Kutai Timur tahun 2019-2020. KPK juga menyita barang bukti yang berupa uang tunai sebesar 170 juta rupiah, beberapa buku tabungan dengan total saldo 4,8 miliar rupiah dan sertifikat deposito yang bernilai 1,2 miliar rupiah.

2. Kasus korupsi Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. KPK menindak kasus ini pada tanggal 27 November 2020. Ajay menjadi tersangka terkait suap izin pembangunan rumah sakit di Cimahi, Jawa Barat. Saat menjadi Wali Kota Cimahi Ajay juga merupakan elite partai politik yang berasal dari PDIP dan menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Cimahi.
3. Kasus korupsi Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah Wenny Bukarno. KPK menetapkan Wenny sebagai tersangka kasus suap untuk *money politic* di Pilkada pada Desember 2020. KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar 2 miliar rupiah. Saat menjadi tersangka korupsi Wenny merupakan Ketua DPC PDIP Banggai Laut.

Memasuki tahun 2021 yang mana masih pada kondisi pandemi, juga terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik. Menurut Ridwan (2021) kasus-kasus korupsi tersebut diantaranya, ialah:

1. Kasus korupsi Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara. Budhi menjadi tersangka kasus korupsi bersama dengan rekannya yaitu Kedy Afandi yang merupakan elite politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KPK melakukan penyelidikan pada kasus ini sejak Mei 2021 atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
2. Kasus korupsi bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai NasDem. Ditetapkan menjadi tersangka pada 30 Agustus 2021 atas kasus suap jual beli jabatan pejabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

3. Kasus korupsi Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI 2019-2024 yang merupakan politikus Partai Golkar. Saat itu posisinya dipartai sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. KPK menindak Aziz pada tanggal 29 September 2021 dan ditetapkan sebagai kasus pemberian hibah atau janji dalam penanganan Dana Alokasi Khusus di Lampung Tengah.
4. Kasus korupsi Dodi Reza Alek Noerdin Bupati Kabupaten Musi Banyuasin. Dodi terjat kasus suap pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 dan menjadi tersangka sejak tanggal 15 Oktober 2021. Saat itu ia juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Sumatra Selatan.

Selain pada kasus-kasus korupsi elite politik di atas, puncak sebenarnya kekecewaan masyarakat kepada partai politik adalah ketika adanya kasus korupsi dari dua Menteri yang juga merupakan elite partai politik. Kasus pertama oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang berasal dari Partai Gerindra. Edhie saat itu juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra. Edhy ditangkap KPK pada 25 November 2020 dan menjadi tersangka terkait penetapan izin ekspor benih lobster yang hampir mencapai 9,8 miliar rupiah (CNN Indonesia, 2021). Kasus kedua yang dilakukan oleh seorang Menteri adalah kasus Juliari Batubara Menteri Sosial. Juliari merupakan politikus dari PDIP yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum PDIP. Juliari menyerahkan diri pada 6 Desember 2020 ke KPK karena sebelumnya sudah ada pergerakan dari KPK untuk menangkap Juliari tetapi dia berhasil kabur lalu diberikanlah ultimatum oleh KPK agar Juliari segera menyerahkan diri. Juliari menjadi tersangka kasus suap pengadaan paket Bantuan Sosial *Covid-19* yang diterimanya sebesar 32,48 miliar rupiah (Sahara, 2021). Setelah terkuaknya kasus ini banyak sekali reaksi yang sangat keras dari masyarakat, karena apa yang telah dilakukan dampaknya sangat dalam menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia ditengah krisis pandemi *Covid-19*.

Elite partai politik yang terjat kasus-kasus korupsi hanya akan menimbulkan dampak buruk bagi partai politik. Dampak yang sangat jelas terlihat adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Pada sistem demokrasi, kepercayaan publik menjadi salah satu hal terpenting jika ingin kualitas

demokrasi menjadi lebih baik. Kepercayaan publik kepada partai politik menjadi sebuah hubungan yang sangat penting antara partai politik dan masyarakat sebagai publik. Dalam negara demokrasi yang mengadakan pemilihan umum secara langsung, partai politik sangat membutuhkan dukungan maupun kepercayaan dari publik (Yuliono, 2013). Jika tidak adanya peran publik sebagai faktor dukungan dan kepercayaan, maka partai politik tidak akan bisa mendapatkan kekuasaan serta menjalankan peran dan fungsi partai maupun dalam melaksanakan program-program kerjanya.

Pada realita yang terjadi di masyarakat selama pandemi *Covid-19* berdasarkan fenomena di atas, kepercayaan publik terhadap partai politik sangat rendah. Dapat dilihat melalui survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Pertama, Lembaga Survei Indonesia yang mengadakan survei dari tanggal 25-31 Januari 2021 sebanyak 65 persen responden yang menyatakan percaya kepada partai politik dibandingkan lembaga-lembaga lainnya yang berada di atas partai politik seperti, DPR dengan 71 persen, KPK dengan 83 persen, Pemerintah Pusat dengan 85 persen, Bupati/Wali Kota 90 persen, Gubernur 91 persen dan TNI dengan 95 persen. LSI mengadakan survei dengan melibatkan 1.200 responden (TEMPO.CO). Kedua, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei dari tanggal 28 Februari sampai 8 maret 2021 dengan hasil yang menyatakan dukungan kepada partai politik sangat rendah hanya 37,3 persen percaya pada partai politik yang menjalankan kinerjanya dengan baik dari 1,898 responden (RMOL Lampung). Ketiga, survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset Puspoll yang diadakan pada tanggal 20-29 April 2021 dengan hasil yang menyatakan bahwa partai politik terdapat pada urutan terakhir yaitu hanya 5,1 persen sangat percaya dan 50,1 persen cukup percaya dari 1.600 responden (Antara News). Keempat, Indikator Politik Indonesia (IPI) juga mengadakan survei yang sama pada 17 hingga 21 September 2021 dan dengan hasil yang sama yaitu partai politik terdapat pada posisi paling bawah dengan tingkat kepercayaan 48 persen dari 1.200 responden (Republika.co.id). Kelima, survei yang dilakukan oleh Timur Barat Research Center (TBRC) pada 24 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022 juga menggelar survei serupa dengan jumlah responden 1.820 dan hasil tersebut

menyatakan bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap partai politik yaitu hanya dikisaran 51,7 persen responden (RMOL.id). Dari semua lembaga survei di atas menggunakan metode *random sampling* dengan *margin of error* rata-rata 2,56 persen dan semuanya mengklaim tingkat kepercayaannya 95 persen.

Dari berbagai survei diatas rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik sangat beralasan, yaitu selama pandemi *Covid-19* banyaknya pejabat atau elite partai politik yang menjadi tersangka kasus-kasus korupsi. Partai politik juga kurang dalam menjalankan peran dan fungsinya sehingga kedekatan ke masyarakat masih sangat kurang. Oleh karena itu, pergerakan partai politik dimasa pandemi sangat dibutuhkan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Menurut Philip Kotler dan Neil Kotler dalam "*Political Marketing: Generating Effective. Candidates, Campaigns, and Causes*" seperti yang dikutip oleh Ramlah (2020) menjelaskan bahwa partai politik dapat menggunakan strategi pemasaran pada suatu momen tertentu sebagai sebuah permintaan pasar yang perlu dipenuhi agar dapat menuai citra terbaik. Pada kasus kali ini kepercayaan publik sangat dibutuhkan untuk mendapatkan citra yang baik bagi partai politik. Apalagi di tengah situasi pandemi *Covid-19* masyarakat pasti sangat mengharapkan peran partai politik.

Pada penelitian kali ini salah satu partai politik yang menjadi bahan penelitian ialah Partai Gerindra pada Pengurus DPC Kota Tangerang. Partai Gerindra yang ada di Kota Tangerang merupakan salah satu partai dengan basis pendukung yang sangat luas dan besar. Partai Gerindra berdiri sejak tahun 2008 dan langsung mengikuti pemilu pertama pada pemilu tahun 2009. Di Kota Tangerang Partai Gerindra telah tiga kali mengikuti pemilu legislatif pada tahun 2009, 2014 dan 2019. Berikut pencapaian Partai Gerindra di Kota Tangerang mulai dari pemilu legislatif 2009-2019.

Tabel 1.1 Perolehan Suara Partai Gerindra Pileg 2009-2019

No	Partai	Pileg Tahun	Perolehan Suara (%)	Urutan Perolehan Suara Terbanyak
1	Partai Gerindra	2009	10%	6
2	Partai Gerindra	2014	12,98%	3
3	Partai Gerindra	2019	15,06%	2

Sumber: KPU Kota Tangerang dalam Arroisi (2017) dan Rumah Pintar

Pemilu Provinsi Banten Tahun 2019

Partai Gerindra di Kota Tangerang sejak pemilu legislatif pertama yang diikuti tahun 2009 hingga yang terakhir pada tahun 2019 selalu mempunyai wakil-wakil yang menduduki parlemen. Selama tiga kali pemilu legislatif, Partai Gerindra di Kota Tangerang perolehan suaranya selalu meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya, Partai Gerindra di Kota Tangerang memiliki tren positif sehingga tingkat perolehan suara selalu bertambah setiap tahun pemilu. Bahkan, pada pileg 2019 berhasil menjadi partai dengan urutan kedua terbanyak pada pemilu legislatif 2019. Banyak faktor yang dapat menunjang keberhasilan partai, seperti program kampanye partai dimasa pemilu, sosok pemimpin partai dan citra yang dibentuk oleh partai melalui peran dan kontribusi partai secara langsung kepada masyarakat. Namun, pada penelitian ini hanya akan berfokus kepada peran Partai Gerindra di Kota Tangerang terutama di tengah pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, melalui wawancara tidak terstruktur dengan salah satu pengurus yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, Pontjo Prayogo. Penulis mendapatkan keterangan terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kota Tangerang bersama dengan kader dan simpatisan partai di tengah pandemi *Covid-19*. Kegiatan tersebut antara lain yaitu donor darah, vaksinasi gratis, bantuan sosial dan bakti sosial, santunan anak yatim, bantuan kursi roda kepada masyarakat difabel, bantuan bencana banjir, penyemprotan disinfektan, dan sosialisasi tentang pencegahan

Covid-19. Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu mulai tahun 2020 sampai awal tahun 2022. Sumber dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari dana partai dan sumbangan dari anggota DPRD Partai Gerindra Kota Tangerang. Dengan beragam bentuk kegiatan tersebut penulis melihat bahwa adanya beberapa kegiatan yang akan menunjang sebagai potensi meningkatkan kepercayaan publik dengan indikatornya yaitu kegiatan dalam bentuk kepedulian sosial, kegiatan yang fokus dalam permasalahan sosial, dilaksanakan secara langsung bersama publik dan merupakan bagian dari orientasi solusi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Partai Gerindra DPC Kota Tangerang sehingga penulis memilih judul **“Peran Partai Politik di Tengah Pandemi Covid-19: Potensi Meningkatkan Kepercayaan Publik (Studi Kasus Pada Partai Gerindra di DPC Gerindra Kota Tangerang)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana kepercayaan publik Kota Tangerang terhadap Partai Gerindra sebelum dan sesudah adanya pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana peran yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kota Tangerang terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19*?
3. Apakah yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kota Tangerang selama pandemi *Covid-19* dapat berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan publik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan kepercayaan publik Kota Tangerang terhadap Partai Gerindra dimasa sebelum dan sesudah adanya pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kota Tangerang terhadap penanggulangan pandemi *Covid-19*.

3. Untuk mengetahui potensi yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kota Tangerang selama pandemi *Covid-19* terhadap tingkat kepercayaan publik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan inspirasi dalam ilmu politik terutama pada kaitanya dengan peran partai politik guna dilakukan penelitian dengan masalah yang sama dan lebih mendalam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Partai Gerindra di Kota Tangerang dalam meningkatkan peran dan fungsi partai. Bagi masyarakat Kota Tangerang penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai peran Partai Gerindra di Kota Tangerang selama masa pandemi *Covid-19*.

E. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN

Ruang lingkup dan batasan penelitian bertujuan untuk membatasi pembahasan pada sebuah penelitian. Tujuan ruang lingkup adalah menentukan konsep utama pada suatu permasalahan agar masalah-masalah yang dilakukan peneliti dapat dimengerti dengan baik. Ruang lingkup penelitian ini adalah peran partai politik di tengah pandemi *Covid-19* yang berpotensi dapat meningkatkan kepercayaan publik. Sedangkan batasan penelitian ini dilakukan pada DPC Partai Gerindra Kota Tangerang. Mengingat peneliti merupakan mahasiswa ilmu politik yang dalam hal ini lebih memfokuskan diri pada peran partai politik.

F. KERANGKA BERPIKIR

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skema berpikir yang menggunakan konsep tentang peran partai politik di masa pandemi yang berpotensi sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik. Didasari oleh adanya suatu fenomena menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada partai politik selama masa pandemi *Covid-19*. Fenomena ini menjadi unik karena terjadi di tengah aktifnya kegiatan-kegiatan partai dalam membantu dan berkontribusi

pada penanganan pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada sejauh mana partai politik berperan di tengah pandemi *Covid-19*.

Peran partai politik pada penelitian ini dapat ditinjau melalui kegiatan-kegiatan selama masa pandemi yang dapat berpotensi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap partai politik. Indikator yang digunakan dalam meningkatkan kepercayaan publik dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan yang berbentuk kepedulian sosial, fokus terhadap permasalahan sosial dan berorientasi solusi sosial di tengah pandemi *Covid-19*. Berdasarkan penjelasan diatas kerangka pemikiran ini dapat disimpulkan melalui bagan dibawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

